



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 989–994

Analisis Statistik Rata-Rata Anggaran Pendapatan APBD 2024 Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

Dondi Setiawan, Jhansen Trinidat, Bakar Ash Shiddiq, Jadianan Parhusip

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Palangka
Raya, Palangka Raya, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2595>

How to Cite this Article

APA : Setiawan, D. ., Trinidat, J., Shiddiq, B. A., & Parhusip, J. (2024). Analisis Statistik Rata-Rata Anggaran Pendapatan APBD 2024 Tingkat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 989 – 994.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2595>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Analisis Statistik Rata-Rata Anggaran Pendapatan APBD 2024 Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

Dondi Setiawan¹, Jhansen Trinidat², Bakar Ash Shiddiq³, Jadianan Parhusip⁴
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya,
Indonesia^{1,2,3,4}

*Email

dondisetiawan1234@gmail.com, jhansentrinidat039@mhs.eng.upr.ac.id,
bakarashshiddiq2@mhs.eng.upr.ac.id, parhusip.jadianan@it.upr.ac.id

Diterima: 13-12-2024

| Disetujui: 14-12-2024

| Diterbitkan: 15-12-2024

ABSTRACT

This study analyzes the allocation of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the district/city level in Central Kalimantan Province for 2024. Using statistical methods, an average budget of 1,625.02 billion with a standard deviation of 570.14 billion was obtained, indicating inequality in budget distribution. North Barito and Kapuas Regencies have budgets far above average, while Sukamara Regency is below the community average, which has an impact on their ability to meet basic needs. This study recommends an analysis of the importance of regional revenue potential and development needs, as well as the need for transparency in budget management to achieve a fairer and more effective distribution. With a better understanding of budget allocation, it is hoped that local governments can establish policies that support inclusive and sustainable development.

Keywords: APBD; Budget Allocation; Statistics; Standard Deviation; Regional Income.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2024. Dengan menggunakan metode statistik, diperoleh rata-rata anggaran sebesar 1,625.02 miliar dengan simpangan baku 570,14 miliar, yang menunjukkan ketidakmerataan dalam distribusi anggaran. Kabupaten Barito Utara dan Kapuas memiliki anggaran yang jauh di atas rata-rata, sementara Kabupaten Sukamara berada di bawah rata-rata, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya analisis potensi pendapatan daerah dan kebutuhan pembangunan, serta perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai distribusi yang lebih adil dan efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang alokasi anggaran, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Katakunci: APBD; Alokasi Anggaran; Statistik; Simpangan Baku; Pendapatan Daerah.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui peraturan daerah (WANCE 2019). APBD berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang merangkum seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah, serta berperan sebagai variabel terukur untuk mengetahui capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya setiap tahunnya (Tri Arso 2021). Dengan demikian, tujuan utama dari APBD adalah untuk mengelola pengeluaran daerah berdasarkan pendapatan yang telah direncanakan (Yulia Ramadhani 2019).

Analisis statistik rata-rata anggaran pendapatan APBD di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting untuk memahami bagaimana alokasi anggaran dapat mempengaruhi pembangunan regional dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan statistik rata-rata, kita dapat mengevaluasi seberapa merata dan tepat sasaran alokasi anggaran, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antar daerah. Alokasi anggaran yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan dalam pengelolaan anggaran sering kali muncul, termasuk ketidakmerataan dalam alokasi anggaran antara kabupaten/kota. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan potensi pendapatan daerah, kebutuhan pembangunan yang berbeda, dan kebijakan pemerintah daerah (Vennus Octolongerens and Alexandra Hukom 2024).

Dalam penelitian ini, analisis anggaran akan dilakukan dengan menggunakan statistik rata-rata dan simpangan baku. Statistik rata-rata (mean) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menghitung nilai rata-rata dari kelompok data (Icam Sutisna 2020). Dalam konteks ini, rata-rata anggaran memberikan gambaran umum tentang jumlah anggaran yang diterima oleh setiap kabupaten/kota. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai anggaran yang diterima dan membaginya dengan jumlah kabupaten/kota yang diteliti, sehingga memberikan informasi dasar tentang kecenderungan umum alokasi anggaran dan membantu peneliti memahami seberapa besar anggaran yang umumnya dialokasikan kepada daerah-daerah tersebut.

Sementara itu, simpangan baku merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran data dalam suatu sampel serta kedekatan titik data individu terhadap nilai rata-rata sampel (Rahmawati et al. 2022). Dalam analisis ini, simpangan baku akan mengukur variabilitas alokasi anggaran di antara kabupaten/kota. Nilai simpangan baku yang rendah menunjukkan bahwa alokasi anggaran relatif merata, sedangkan nilai yang tinggi menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan dalam alokasi anggaran (Alif and Hapsoro 2021). Dengan demikian, simpangan baku memberikan wawasan penting mengenai konsistensi dan keadilan dalam alokasi sumber daya. Rata-rata anggaran menunjukkan titik pusat dari distribusi anggaran, memberikan informasi dasar tentang kecenderungan umum alokasi anggaran. Di sisi lain, simpangan baku memberikan wawasan mengenai konsistensi alokasi anggaran, nilai simpangan baku yang rendah menunjukkan bahwa alokasi anggaran relatif merata, sedangkan nilai yang tinggi menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan antara kabupaten/kota.

Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola alokasi anggaran serta implikasinya terhadap pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai alokasi anggaran, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data anggaran APBD untuk tahun 2024 yang mencakup informasi mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing kabupaten/kota. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi dan validasi untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan konsisten, serta menghapus entri yang tidak relevan atau duplikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, analisis data anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah akan dipaparkan. Data yang digunakan berasal dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2024.

Hasil Statistik Rata-Rata Anggaran

Berdasarkan data yang dikumpulkan, total anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kabupaten/kota menunjukkan variasi yang signifikan. Tabel berikut merangkum total anggaran untuk 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah:

Table 1 Total Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

<i>Nama Kabupaten</i>	Total Anggaran (miliar)
Kota Palangka raya	1464,01
Kab. Barito Selatan	1489,25
Kab. Barito Utara	2645,42
Kab. Kapuas	2423,47
Kab. Kotawaringin Barat	1653,14
Kab. Kotawaringin Timur	2428,26
Kab. Katingan	1505,38
Kab. Seruyan	1294,25
Kab. Sukamara	790,16
Kab. Lamandau	1045,09
Kab. Gunung Mas	1248,07
Kab. Pulang Pisau	1391,80
Kab. Murung Raya	2183,81
Kab. Barito Timur	1188,13

(Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024)

Total anggaran untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 22,750.24 miliar. Rata-rata anggaran untuk kabupaten/kota dihitung dengan menjumlahkan total anggaran dan membaginya dengan jumlah kabupaten/kota yang diteliti. Berdasarkan perhitungan, rata-rata anggaran

adalah 1,625.02 miliar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidakmerataan dalam alokasi anggaran di antara kabupaten/kota. Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas memiliki total anggaran yang jauh di atas rata-rata, masing-masing sebesar 2,645.42 miliar dan 2,423.47 miliar. Hal ini memberikan mereka kapasitas yang lebih besar untuk menyediakan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sebaliknya, Kabupaten Sukamara dengan total anggaran sebesar 790.16 miliar berada jauh di bawah rata-rata. Dengan alokasi yang rendah, kabupaten ini mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan memperburuk kesejahteraan sosial.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran untuk memastikan distribusi sumber daya dilakukan secara adil dan efektif. Salah satu faktor kunci adalah potensi pendapatan daerah yang bervariasi antar kabupaten/kota, yang mencakup sumber daya alam, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya (Antara and Yogantari 2018). Dengan menganalisis potensi pendapatan ini, pemerintah daerah dapat merencanakan alokasi anggaran yang lebih realistis dan berkelanjutan. Selain itu, kebutuhan pembangunan di setiap daerah juga harus dianalisis secara mendalam. Kebutuhan ini dapat mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berbeda-beda di setiap wilayah. Dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan spesifik ini, alokasi anggaran dapat disesuaikan untuk menangani isu-isu yang paling mendesak. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga memainkan peran penting dalam menentukan alokasi anggaran (Askam 2008). Kebijakan prioritas pembangunan dan program-program strategis yang ditetapkan harus diperhatikan agar alokasi anggaran sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang (Mongan 2019). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus beradaptasi terhadap perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mendukung pencapaian target-target tersebut.

Pengelolaan anggaran yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan (Dama et al. 2025). Pemerintah daerah perlu melakukan analisis komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan daerah sebelum menentukan alokasi anggaran. Pendekatan ini dapat melibatkan survei masyarakat, konsultasi publik, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan perencanaan yang tepat sasaran. Alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kondisi unik setiap daerah. Misalnya, daerah terpencil mungkin membutuhkan lebih banyak anggaran untuk infrastruktur, sedangkan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi memerlukan lebih banyak dana untuk program kesejahteraan sosial. Penyesuaian ini penting untuk mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan publik.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat (Salle 2017). Pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang jelas tentang alokasi, penggunaan, dan hasil anggaran. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses anggaran. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran adalah langkah penting untuk memastikan alokasi dana sesuai harapan dan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah dapat mengadakan forum atau konsultasi publik untuk mendengarkan masukan masyarakat dan memberi mereka suara dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka.

Hasil Simpangan Baku Anggaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa simpangan baku untuk total anggaran di tingkat kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 570,14 miliar. Nilai ini menggambarkan variabilitas alokasi anggaran di antara daerah-daerah yang diteliti. Simpangan baku yang tinggi ini menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan dalam distribusi anggaran, yang dapat berdampak pada kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai contoh, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas memiliki total anggaran yang jauh di atas rata-rata, masing-masing sebesar 2,645.42 miliar dan 2,423.47 miliar. Dengan anggaran yang besar, kedua kabupaten ini memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebaliknya, Kabupaten Sukamara, dengan total anggaran sebesar 790.16 miliar, berada jauh di bawah rata-rata dan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Simpangan baku yang tinggi ini juga mengindikasikan perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam merencanakan alokasi anggaran. Ketidakmerataan dalam alokasi dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan memperburuk kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran sangat penting, termasuk potensi pendapatan daerah, kebutuhan pembangunan, dan kebijakan pemerintah yang ada. Dengan memahami variabilitas ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

KESIMPULAN

Analisis anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam alokasi anggaran. Rata-rata anggaran mencapai 1,625.02 miliar, namun terdapat ketidakmerataan yang terlihat dari simpangan baku sebesar 570,14 miliar. Kabupaten Barito Utara dan Kapuas memiliki anggaran yang jauh di atas rata-rata, memberikan mereka kapasitas yang lebih besar untuk menyediakan layanan publik. Sebaliknya, Kabupaten Sukamara, dengan total anggaran 790,16 miliar, menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengelolaan anggaran yang adil dan efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mempertimbangkan potensi pendapatan, kebutuhan pembangunan, dan kebijakan yang berlaku dalam merencanakan alokasi anggaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat dicapai distribusi sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Satrio Muhammad, and Pungkas Tri Hapsoro. 2021. "Penentuan Titik IGS Sebagai Titik Ikat Dalam Pengolahan Data GNSS Untuk Studi Geodinamika Di Pulau Sumatra." *Jurnal Tekno Global UIGM Fakultas Teknik* 10(2):72–78. doi: 10.36982/jtg.v10i2.1921.
- Antara, Made, and Made Vairagya Yogantari. 2018. "Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inovasi Industri Kreatif." *Senada* 1:292–301.

- Askam, Tuasikal. 2008. "Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia." *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 1(2):142–55.
- Dama, Desi Putri, Ghoriqna Fibahril Wahdah, Nur Rizky, and Putri Mahadi. 2025. "PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SETDA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025." 5(5):9135–41.
- Icam Sutisna. 2020. "Statistika Penelitian." *Universitas Negeri Gorontalo* 1–15.
- Mongan, Jehuda Jean Sanny. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4(2):163–76. doi: 10.33105/itrev.v4i2.122.
- Rahmawati, Devilia, Erwin Prayoga Ali, Muty Nurvia, and Erwin Harahap. 2022. "Aplikasi Simpangan Baku Menggunakan Microsoft Excel (The Application of Standar Deviation Using Microsoft Excel) Aplikasi Simpangan Baku Menggunakan Microsoft Excel The Application of Standar Deviation Using Microsoft Excel." (September).
- Salle, Agustinus. 2017. "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 1(1):1–19. doi: 10.52062/keuda.v1i1.740.
- Tri Arso, Gunawan Hi Abas. 2021. "KONSISTENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA TERHADAP APBD TAHUN 2019." 6(1):6.
- Vennus Octolongerens, and Alexandra Hukom. 2024. "Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2(2):52–75. doi: 10.61132/jepi.v2i2.521.
- WANCE, MARNO. 2019. "Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 5(1):1–17. doi: 10.52447/ijpa.v5i1.1648.
- Yulia Ramadhani, Nasrah. 2019. "Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng." 2:42–51.